



KARAKTERISTIK PENATAAN RUANG DAN FASILITAS PUBLIK PADA KAMPUNG PULAU BELIMBING

Muhd. Arief Al Husaini

Dosen, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Riau

Abstrak

Modernisasi pengembangan kota seharusnya tidak menghilangkan nilai-nilai dari prinsip tradisional dan kearifan lokal. Berdasarkan strategi pengembangan desentralisasi dalam proses *friendly city* seharusnya lebih dekat merujuk pada kediaman lokal tradisional. Kampung Pulau Belimbing telah mempraktekkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan dan rancangan ruang dan fasilitas publik sejak ratusan tahun dahulu. Kampung tradisional dikembangkan dengan karakteristik berdasarkan keadilan dan kesamaan dalam mencapai kebutuhan suku. Pengetahuan dan aplikasi kearifan lokal ini dapat membantu pengembangan kota berbasis *friendly city*, khususnya di kota Melayu. Tujuan dari makalah ini untuk meninjau karakteristik ruang dan fasilitas publik di Kampung Pulau Belimbing sebagai acuan perancangan kota yang berbasis *friendly city*. Penelitian ini menerapkan paradigma naturalistik dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis diachronic reading. Studi ini menunjukkan bahwa Kampung Pulau Belimbing telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *friendly city* pada ruang dan fasilitas publik. Penerapan kearifan lokal ini dapat menjadi model untuk pengembangan kota masa depan, khususnya ketepatan pada ruang publik.

Kata Kunci : Ruang Publik, Fasilitas Publik, Kampung Tradisional, Pulau Belimbing, Kearifan Lokal

Abstract

The modernization of urban development should not lose the values of traditional principles and local wisdom. According to decentralization development strategic, in creating friendly city should be closely related to traditional inhabitation wisdom. Pulau Belimbing traditional neighborhood has practiced local wisdom values in planning and designing of public space and facilities for hundreds of years. The traditional kampong is developed with the characteristics of space fairness and equal accessibility to accommodate the needs of local tribes. The knowledge and application of such wisdom could help in the planning of friendly city development, especially in Malay land. The aim of this paper is to review the characteristic of public space and facilities planning in Pulau Belimbing traditional neighborhood. This research applies naturalistic paradigm with qualitative approach and diachronic reading as the tool of analysis. The study indicates that Pulau Belimbing traditional neighborhood has implemented the principles of friendly city in planning of public space and facilities. The tradition inhabitation wisdom can be model for the development of future city, especially in public spaces provision.

Pendahuluan

Indonesia dikenal memiliki ragam budaya yang telah mengakar sejak lama. Cerminan budaya ini tergambarkan dalam aspek dasar kehidupan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Salah satunya seperti proses pembentukan permukiman yang dipengaruhi oleh budaya dan geografi wilayah yang dipilih. Pemukiman sendiri adalah wadah aktivitas manusia yang diperoleh dari memaknai keadaan fisik alami, kebutuhan untuk hidup secara biologis (*man*), sosial, naungan bangunan, dan jaringan jalan (Doxiadis, 1968). Kelima elemen tersebut membentuk lingkungan dasar sebagai wadah bagi manusia yang membentuk kelompok-kelompok sosial. Hal ini karena adanya suatu masyarakat yang terhubung dengan satu sama lainnya. Lebih lanjut karakteristik struktur permukiman tradisional pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, dan orientasi melalui hirarki dan jaringan. Selanjutnya menjadi dasar kota ramah dimasa depan yang mengedepankan kota ramah.

Penelitian ini fokus pada Kampung Pulau Belimbing yang tergolong sebagai salah satu permukiman tradisional yang bercirikan Melayu. Definisi kampung diidentikkan sebagai penyebutan nama tempat yang dalam arsitektur merupakan sebagai permukiman. Pada Kampung Pulau Belimbing telah terbentuk permukiman yang kompleks yang ditandai dengan adanya keberagaman suku, adanya pembatasan wilayah masing-masing suku, adanya hirarki baik ruang maupun jaringan jalan (skala mikro-mezzo-makro), adanya penempatan fasilitas berdasarkan batasan pengguna. Kampung Pulau Belimbing berada di Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kampung ini merupakan

kampung awal di daerah ini yang kemudian bertransformasi dan membentuk kampung-kampung baru di sekitarnya. Kampung ini secara geografis berada di tepi sungai Kampar. Pada awalnya transportasi menggunakan jalur sungai dan kampung berkembang ditepi sungai.

Kampung ini terdapat keberagaman etnis dengan rumpun yang sama. Dari wawancara diketahui, bahwa Kampung Pulau Belimbing dihuni oleh kelompok rumpun suku melayu yang terdiri dari beberapa klan kecil seperti Domo, Melayu Maharajolelo, Chaniago, Pitopang, dan Piliang. Kampung ini memiliki aturan yang melekat baik secara fisik maupun non fisik. Aturan tersebut bertujuan untuk mencapai keamanan dan kestabilan kampung. Pertama, aturan tentang adanya pembagian masing-masing zona permukiman masing-masing suku. Masyarakat akan mendiami wilayah yang telah yang ditetapkan sebagai wilayah permukimannya, sehingga tidak adanya percampuran suku. Kedua, aturan tentang penentuan hirarki jalan berupa jalan umum dan jalan khusus permukiman suku. Ketiga, aturan tentang penyediaan fasilitas baik fasilitas umum kampung maupun fasilitas khusus masing-masing suku. Fasilitas-fasilitas ditempatkan sesuai pada zona masing-masing berdasarkan fungsinya. Fasilitas umum telah ditetapkan berupa fasilitas pendidikan, ibadah, kesehatan, olahraga, dan hiburan. Sedangkan fasilitas khusus masing-masing suku ditujukan untuk kegiatan khusus masing-masing suku seperti permukiman, nongsa, tanah usaha, pemakaman, dan pemandian.

Isu penting di Indonesia akhir-akhir ini adalah adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan pengembangan wilayahnya. Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi dalam proses pengembangan kawasan. Desentralisasi

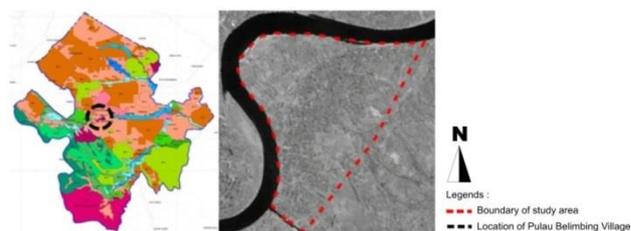
sendiri adalah penyerahan wewenang atau kebijakan kepada masing-masing daerah untuk mengatur pekerjaannya sendiri. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termasuk juga dibidang arsitektur dan perencanaan kota. Salah satu kelemahan desentralisasi adalah lemahnya pendalaman *local wisdom* disebabkan berkurangnya penelitian mendalam akibat biaya yang tinggi dan perundingan yang bertele-tele. Hal itu menyebabkan mudahnya melaksanakan program yang tidak memiliki karakter kuat berdasarkan kebutuhan lokal, melainkan meniru apa yang sedang berkembang di kota lain. Contoh lain adalah dalam satu provinsi muncul keberagaman bangunan yang saling tolak menolak dalam azas karakter pembangunan.

Hal ini diperburuk oleh adanya *modern movement* dalam bidang arsitektur, yang memunculkan sikap saling meniru apa yang berhasil di luar sana. Padahal nilai yang dibawa olehnya tidak sesuai jika diterapkan dikotanya. Selanjutnya menimbulkan permasalahan yang serupa bahwa kota-kota di Indoensia akan seragam tanpa memiliki nilai-nilai yang khas. Hal lain adalah tergerusnya nilai-nilai tradisional dalam mengatur permukimannya seperti mengatur zonasi, fasilitas, ruang publik, dan jaringan jalan. Dengan membandingkan teoritis dan fakta empirik bahwa diduga Kampung Pulau Belimbing telah menerapkan prinsip *friendly city*, khususnya pada ruang publik dan fasilitas. Oleh karena itu, penelitian ini melihat prinsip-prinsip *friendly city* khususnya pada ruang publik dan fasilitas yang diterapkan pada Kampung Pulau Belimbing. Prinsip Kampung Pulau Belimbing seperti kenyamanan tinggal, penempatan ruang publik dan fasilitas yang adil, dan mampu mengakomodasi seluruh suku, dan adanya perhatian jaringan jalan. Prinsip *Friendly city* Kampung Pulau Belimbing memiliki karakteristik tersendiri yaitu berkarakter

melayu. Hal ini dapat dijadikan sebagai model atau percontohan dalam mengembangkan perkotaan dimasa depan yang berkarakter kota ideal.

Lokasi Penelitian

Kampung Pulau Belimbing memiliki luas ± 1.6 km² yang mana berlokasi di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kampung ini merupakan salah satu kampung tradisional dengan budaya Melayu dengan basis ekonomi adalah nelayan sungai, pertanian dan perkebunan. Kampung ini berada di tepi Sungai Kampar.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Sumber: Penginderaan Google Earth, 2008)

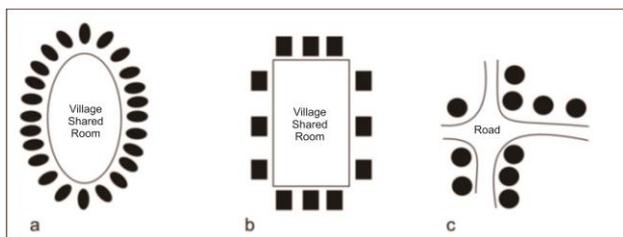
Studi Literatur

Kehidupan manusia selalu bergantung pada tempat dimana dia tinggal. Hal ini terkait dengan penyediaan ruang bagi keberlangsungan kegiatan. Selain itu, tempat harus memberikan rasa aman, kesenangan, dan penjaminan hidup. Proses ini yang dilewati oleh masyarakat tradisional Indonesia sejak dulu hingga masyarakat modern saat ini, yaitu proses mendiami suatu wilayah. Tempat tinggal ini selalu tumbuh menuju kompleksitas yang semakin tinggi. Berawal dari sebuah *compound* menjadi kampung dan berakhir sebuah kota yang dikenal saat ini. Fokus pada paper ini adalah mempelajari proses awal pada perkampungan tradisional yang selanjutnya disebut kampung.

Kampung tradisional di Indonesia diidentik dengan hubungan kekerabatan dan rasa memiliki sebuah tempat. Pada tahun 1984,

Herbasuki menjelaskan bahwa kampung merupakan lingkungan tradisional yang ditandai dengan ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan keluarga yang erat dan kebiasaan-kebiasaan tradisional. Selanjutnya pada tahun 1991, Budiharjo berpendapat, bahwa identitas kampung adalah sebuah jejak peradaban yang ditampilkan sepanjang sejarah suatu wilayah yang tidak bisa difabrikasikan pada suatu saat saja atau yang disebut *instant culture* (budaya dadakan). Pada perkampungan tradisional terdapat berbagai suku, kebudayaan, dan agama yang menyebabkan secara arsitektural terdapat berbagai macam bentuk atau pola penataan ruang secara tradisional. Pola tradisional tersebut mengacu pada kebudayaan dan lokalitas kesetempatan masing-masing daerah. Selain itu, pada tahun 1996, Pamuk mengatakan bahwa dalam masyarakat tradisional, status tanah dan klaim atas tanah muncul sebagai kewenangan yang diberikan oleh kekeluargaan, hukum adat, kasta, dan sebagainya.

Pada tahun 1969, Rapoport melihat beberapa identitas sebuah kampung dari segi morfologi penataan ruang yaitu suatu kampung dengan hunian rumah yang mengelilingi suatu pusat ruang kampung, bentuk dan material-material dari hunian dan pusat ruang kampung sama yang berubah secara tidak mendasar dengan pengaturan alami, pengaturan rumah tradisional sepanjang jalan sehingga fundamental menghasilkan permukiman yang berbeda.



Gambar 2. Jenis Struktur Kampung (Sumber: Rapoport, 1969)

Lebih dalam lagi aspek-aspek *friendly city* yaitu permukiman, partisipasi sosial, rasa hormat dan sosial inklusif, partisipasi pemerintah, komunikasi dan informasi, dukungan komunitas dan layanan kesehatan, ruang luar dan bangunan-bangunan, dan transportasi (Colangeli, 2007). Pada tahun 2009, Mori mengatakan, bahwa aksesibilitas jalan menjadi perhatian penting bahwa sebuah jalan harus tujuan yang jelas, menghindari kebingungan, dan, visi yang tinggi.

Selanjutnya Mori (2009) menambahkan hal penting lainnya yaitu setiap orang harus merasakan kemudahan hidup, produk kota yang disediakan dipertimbangkan harus dapat digunakan oleh semua, layanan dan informasi yang merata, adanya rasa kemandirian dalam bekerja, dan simbiotik sosial.

Metode Penelitian

Tujuan dari makalah ini adalah menelaah karakteristik ruang dan fasilitas publik pada kampung tradisional Pulau Belimbing. Dasar dari penelitian ini adalah naturalistik dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini memfokuskan adanya interpretasi dan deskripsi secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengungkapkan perubahan dan fakta pada kampung Pulau Belimbing. Metode sejarah akan melalui empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu mewawancarai secara mendalam terhadap nara sumber yang memahami kondisi sebenarnya sampai informasi yang diperoleh berulang.

Metode analisis yang diterapkan adalah *diachronic reading* untuk menemukan karakteristik dasar dari ruang dan fasilitas publik Kampung Pulau Belimbing. Fakta yang

ditemukan pada lokasi penelitian akan dianalisis dan dideskripsikan untuk memperoleh tujuan penelitian. Komponen penting pada penelitian ini adalah penekanan pada *setting* alamiah, interpretasi, dan maksud.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Kampung Pulau Belimbing

Pandangan morfologi dari segi arsitektur adalah studi tentang bentuk, struktur ruang dan lingkungan binaan baik secara fisik maupun pengaruh non fisik. Maka karakter kampung Pulau Belimbing akan dilihat dari aspek fisik maupun non fisik. Aspek non fisik dilihat berdasarkan sistem kemasyarakatan/kekerabatan, ekonomi, kehidupan budaya/religi. Sedangkan aspek non fisik akan ditinjau berdasarkan guna lahan, permukiman, dan elemen pemukiman. Selanjutnya dibahas secara berurutan yaitu aspek non fisik dan fisik.

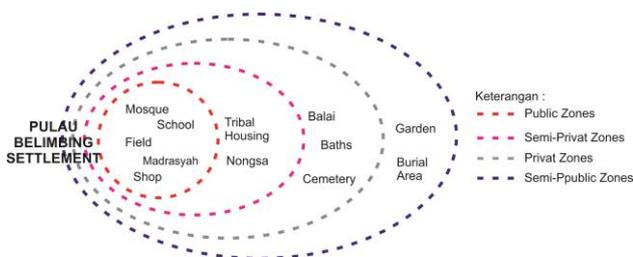
Secara pemerintahan Kampung Pulau Belimbing memiliki beberapa fase yaitu fase perkembangan awal, penjajahan Belanda, dan Saat ini. Saat awal pembentukan Kampung Pulau Belimbing merupakan area masyarakat pelaut yang mencoba menetap. Hal itu erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan tua yang ada di Provinsi Riau dan Lingga. Selanjutnya pada tahun 1946 pemerintah memasukkan Kampung Pulau Belimbing kedalam daerah administratif desa Kuok yang tergabung pada Kenegerian Lima Puluh Koto Provinsi Sumatra Barat yang dipimpin oleh Datu' atau Ninik Mamak. Hal ini menjadi spekulasi merubah haluan sejarah yang mengaitkan Pulau Belimbing berasal dari Suku Minangkabau. Seiring terbentuknya Kabupaten Kampar pada tahun 1950, maka kenegrian Kuok dikembalikan kedalamnya. Secara langsung Pulau Belimbing berada pada administratif Kabupaten Kampar.

Dari wawancara didapat, bahwa selain lembaga pemerintahan terdapat lembaga adat yang dipimpin oleh kepala suku serta perangkat adat yang memiliki peran masing-masing seperti Dubalang, Datuk Geno, dan lain-lain. Saat terjadi permasalahan antar masyarakat maka Ninik Mamak yang akan menjadi hakim dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan pada kampung akan diadakan musyawarah di Nongsa adat masing-masing suku atau ditunjuk satu suku sebagai tuan rumah. Sistem kemasyarakatan pada kampung Pulau Belimbing berasaskan pada kekerabatan dan kekeluargaan. Kampung terdiri dari beberapa suku yaitu Domo, Melayu Maharajolelo, Piliang, Pitopang, dan Chaniago. Setiap masing-masing suku akan dipimpin oleh perangkat adat suku yaitu Niniok Mamak. Hukum adat berlaku sudah sejak lama yang mengatur tentang pernikahan, tanah wilayah, peruntukan lahan perkebunan dan pertanian, dan kuburan. Pada kampung ini adanya aturan yang mengatur pernikahan bahwa tidak diijinkan pernikahan sesama suku. Kampung ini mengadopsi sistem matrilineal yaitu masyarakat yang mengatur keturunan berasal dari pihak ibu. Contohnya jika seorang ibu berasal dari suku Melayu Maharajolelo, maka anak-anaknya akan mengadopsi suku Melayu Maharajolelo.

Pada umumnya masyarakat kampung Pulau Belimbing memiliki latar belakang keagamaan yang sama yaitu Islam. Dalam menjalankan keagamaan masyarakat tergolong taat bahkan. Sehingga banyak ritual-ritual yang dikaitkan dengan agama seperti mandi Balimau Kasai, Baoguang, Mandandang langik, acara makan bajambau, mengaji di nongsa, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi masyarakat mengandalkan pengolahan geografi seperti sungai dan tanah. Sebagian kecil masyarakat memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian seperti nelayan dan keramba. Sebagian besar menjadi petani dengan memanfaatkan tanah sebagai

area persawahan dan perkebunan. Jenis tanaman yang di tanam seperti padi, jagung, dan ubi. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi potensi kuat adalah jeruk manis.

Dari segi aspek fisik Kampung Pulau Belimbing memiliki hirarki ruang yang ditentukan berdasarkan keintiman sebuah ruang. Hirarki ruang ini akbat adanya zonasi ruang berupa kawasan publik, semi publik, privat dan semi privat. Kawasan publik terdapat fasilitas umum kampung yang digunakan oleh semua suku seperti sekolah, madrasah, lapangan, kedai, dll. Kawasan semi publik yaitu lahan yang boleh dimiliki oleh masing-masing suku namun boleh bekerja sama antar suku seperti kebun, ladang, Balai, dan kedai. Kawasan semi privat yaitu permukiman suku dan nongsa suku. Hal ini karena suku lain masih boleh berkunjung satu sama lainnya dan anak-anak suku lain masih diperbolehkan datang untuk belajar mengaji ke Nongsa suku lain. Kawasan privat seperti pemandian suku dan kuburan. Hal itu dikarenakan tidak boleh digunakan oleh suku lain. Strukur hirarki ruang kampung Pulau Belimbing dapat dilihat pada ilustrasi Gambar 3.



Gambar 3. Hirarki Ruang Kampung Pulau Belimbing (Sumber: Penulis, 2008)

Karakteristik Ruang Publik dan Fasilitas

Kampung Pulau Belimbing merupakan salah satu kampung tradisional melayu yang ada di Kabupaten Kampar. Sebelumnya dijelaskan bahwa sebagai kampung melayu mengadopsi nilai-nilai budaya dalam sendi-sendi kehidupan. Nilai-nilai budaya tergambarkan seperti

pepatah kampung setempat yaitu “kabukik samo mandaki, kalura samo manurun. Pepatah ini mengandung nilai-nilai keadilan, seimbang, sama rata bagi semua masyarakat. Pepatah ini juga diterapkan pada penataan kampung bahwa adanya rasa keadilan dalam menempatkan dan penggunaan suatu elemen kampung khususnya ruang publik dan fasilitas.



Gambar 4. Ruang Publik Kampung Pulau Belimbing (Sumber: Penulis, 2008)

Masyarakat kampung Pulau Belimbing melihat adanya ragam kebutuhan masyarakatnya baik dari aspek ibadah, hiburan, ruang komunal, pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut diwadahi dengan ruang publik seperti masjid, ruang teater, lapangan olahraga, masdrasyah dan sekolah, kedai, dan ruang terbuka. Untuk mengakomodasi seluruh suku maka ruang publik diletakkan ditengah-tengah kampung atau di sekitar permukiman suku. Keberhasilan ruang publik ini secara adil ditandai dapat dijangkau langsung oleh seluruh suku dari permukiamnnya. Sehingga keadilan ruang publik ini mendorong rendahnya tingkat permasalahan dan sengketa antar suku di Kampung Pulau Belimbing.

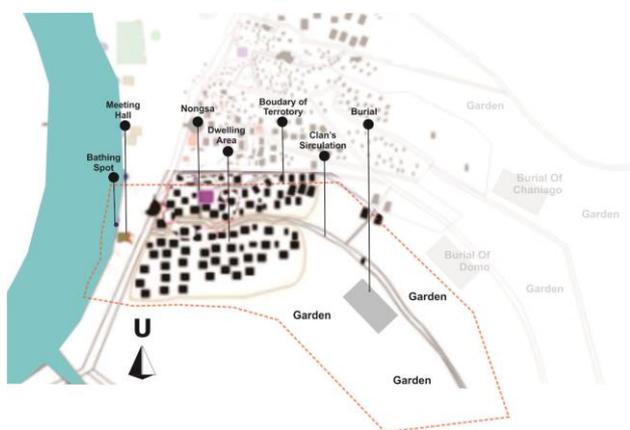


Gambar 5. Peletakan Ruang Publik Kampung Pulau Belimbing (Sumber: Penulis, 2008)



Gambar 6. Fasilitas Khusus Setiap Suku (Sumber: Penulis, 2008)

Dengan adanya aturan teritori maka setiap suku mendapatkan wilayah masing-masing yang dilengkapi dengan fasilitas persukuannya. Setiap suku memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas. Fasilitas persukuan seperti pemukiman, Nongsa, Balai, pemandian, kuburan, kebun, dan ladang. Fasilitas ini linear sepanjang jalan persukuan. Fasilitas persukuan memiliki tingkatan akses. Fasilitas yang tidak boleh diakses oleh suku lain seperti pemandian dan kuburan. Fasilitas boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu seperti anak kecil suku lain belajar di Nongsa suku lain dan bertamu pada rumah suku lain. Fasilitas yang boleh bekerja sama dengan suku lain misalnya kebun dan ladang, tetapi tidak merubah status kepemilikannya.



Gambar 7. Pembagian Wilayah dan Fasilitas Suku Melayu Maharaja Ielo (Sumber: Penulis, 2008)

Kampung Pulau Belimbing memiliki hirarki jalan yang jelas dan mudah, yaitu jalan utama kampung dan jalan khusus permukiman. Adanya pembagian jalan menyebabkan masyarakat mudah menentukan tujuan dan arah mencapai suatu tempat. Jika masyarakat

menuju fasilitas publik maka masyarakat dapat langsung memilih jalan permukiman kemudian jalan utama kampung yang langsung terhubung dengan rung publik tersebut, sehingga tidak perlu melewati permukiman suku lainnya yang bersifat jalan privat. Sedangkan jika masyarakat menuju fasilitas sukunya maka masyarakat cukup berjalan di jalan permukiman saja. Jalan ini menghubungkan semua fasilitas permukiman. Pengaturan penyediaan jalan ini memberikan aksesibilitas dan konektivitas kampung yang tinggi.



Gambar 8. Aksesibilitas dan Sirkulasi Kampung Pulau belimbing (Sumber: Penulis, 2008)

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa dalam menghadapi problematika desentralisasi bahwa seluruh stakeholder harus berpikir dalam menata kota sebaik mungkin, namun tidak melupakan karakteristik lokal. Kedepannya isu dalam menata kota harus sudah memasuki konsep *friendly city* dimana azas yang paling utama dipertimbangkan bahwa kota harus mampu menghadirkan elemen yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakatnya, adanya keadilan ruang dalam penggunaannya baik dalam artian keterbukaan fasilitas untuk seluruh pengguna dan keterjangkaun dari segala arah kota. Selain itu, *friendly city* tentu mengedepankan penyediaan fasilitas untuk segala aspek kegiatan untuk menjawab kebutuhan

ruang masyarakat. Akses dan sirkulasi harus jelas dan mudah. Melalui penelitian ini bahwa Kampung Pulau Belimbing yang sudah berdiri sejak lama telah menerapkan konsep *friendly city*. Paper ini khusus membahas *friendly city* terkait ruang publik dan fasilitas. Kampung Pulau Belimbing telah menyediakan berbagai fasilitas ruang publik baik segi ruang terbuka, ibadah, hiburan, pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Seluruh ruang publik mampu diakomodasi dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Penempatan ruang publik diletakkan ditengah-tengah kampung sehingga mudah dijangkau dan adanya rasa keadilan ruang. Salah satu manfaat peletakan ini adalah pemerataan layanan dan informasi bagi masyarakat. Disisi lain, penyediaan jalan dan sirkulasi yang jelas terhadap pencapaian suatu ruang pada kampung sehingga pergerakan masyarakat memiliki tujuan yang jelas.

Keberhasilan Kampung Pulau Belimbing dalam menata kampung menyebabkan munculnya partisipasi sosial, rasa hormat dan sosial inklusif, kenyamanan tinggal, rendahnya angka kejahatan, dan tidak adanya permasalahan antar suku. Oleh karena itu, pelajaran dari Kampung Pulau Belimbing dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengemban dan penataan kota kedepannya. Penataan kota yang modern namun tidak melupakn kearifan dan karaktersitik lokal, sehingga setiap kota memiliki keunikan tersendiri.

Daftar Pustaka

- Budiharjo, Eko. (1991). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Alumni 1991. Bandung.
- Colangeli, J. A. (2010). *Planning For Age-Friendly Cities; Towards a New Model*. Unpublished Manuscript. Ontario, Canada.
- Doxiadis, C.A (1968). *Ekistik : An Introduction to The Science of Human Sttlement*. Hutchinson and Co. London.
- Mori, T. (2009). *Shizuoka Prefecture; Universal Design*. Unpublished Manuscript. Japan; Shizuoka Prefecture.
- Rapoport, Amos. (1969). *House Form and Culture*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
- Wibowo, Herbasuki (1984). *Penelitian Arsitektur Daerah Nusa Tenggara Barat*. Kerjasama Pemda tingkat I NTB dengan ITS Surabaya. Surabaya.